

PROPOSAL

RUMAH HARAPAN

📅 Tanggal Implementasi Inovasi

Wednesday, 09 September 2015

Instansi : Pemerintah Kab. Kebumen

Kelompok Umum

Kategori Kategori 1

Pelayanan Publik yang inklusif dan berkeadilan

URL Youtube

<https://youtu.be/3xDFeWNYAw0>

URL Bukti Iniasi Inovasi

<https://youtu.be/UxpeaNrqGTw> , <https://youtu.be/FBiXAeht10A> , <https://youtu.be/xbkhBbqgwSg> ,

<https://youtu.be/1w-1dYF3aR8>

SURAT KEPUTUSAN

Terlampir

Ringkasan (5%)

Jelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan, setidaknya meliputi: implementasi, dampak, dan relevansi inovasi dengan kategori yang dipilih.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 200 kata.

Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-P2K) **“RUMAH HARAPAN”** diluncurkan pada September 2015 dan berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesmas SLRT) dengan 10 layanan (2020).

Kategori inovasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, **“RUMAH HARAPAN”** mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pertama ‘Tanpa Kemiskinan’ dan tujuan sepuluh ‘Berkurangnya Kesenjangan’.

“RUMAH HARAPAN” menjadi garda terdepan yang diakses masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap layanan dan bantuan sosial. Hadir ditengah masyarakat memberi : Informasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Membangun Sistem Informasi Bantuan Sosial Terpadu Kebumen (SOBATKU) sebagai wadah aduan, Penjangkauan oleh fasilitator untuk mengetahui kepesertaan dan kebutuhan program, Pusat penanganan keluhan dan rujukan, Menghubungkan masyarakat miskin mendapat multi layanan lintas sektoral sesuai kebutuhan.

Capaian 2021, Fasilitasi rujukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) 4.203 orang, reaktivasi KIS 357 orang, ajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 145 orang, pendistribusian alat bantu bagi penyandang cacat 590 orang, bantuan keuangan untuk buruh migran 3 orang (2021).

Saat ini telah direplikasi 2 Puskesmas tingkat desa dengan predikat termiskin (2019) yaitu Desa Krakal dan Desa Peniron, sebagai layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) tingkat desa, yang merupakan ‘miniatur’ SLRT kabupaten. Layanan Puskesmas dilakukan untuk warga sebagai perwujudan negara hadir

memberikan layanan kepada masyarakat secara inklusif (2022).

Belum mengunggah berkas pendukung Ringkasan

Komentar/Saran evaluasi:

E1

Uraian ringkasan jelas dan lengkap menguraikan implementasi, dampak, dan relevansi inovasi dengan kategori yang dipilih.

E2

Uraian baik, namun data dukung belum diunggah

Ide Inovatif (20%)

Uraikan latar belakang dan tujuan dari inovasi, kesesuaian permasalahan yang akan diatasi melalui Inovasi dengan kategori yang dipilih, dan sisi kebaruan atau nilai tambah dari inovasi ini dalam konteks wilayah Anda.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 600 kata.

Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021, jumlah masyarakat miskin (maskin) di Kabupaten Kebumen sebanyak 212.90 jiwa atau sebesar 17,83% dari jumlah penduduk. Angka ini merupakan prosentase tertinggi di Jateng sehingga Kebumen mendapat predikat Kabupaten Termiskin selama 3 tahun, berturut-turut sejak 2019.

Meskipun berbagai upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan, jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi. Banyak kasus orang miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif dan banyak keluarga miskin yang tidak menerima manfaat dari program yang tersedia walaupun layak menjadi

penerima.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 tahun 2015, pada September 2015 telah diluncurkan UPT-P2K **"RUMAH HARAPAN"** Kabupaten Kebumen bersamaan dengan launching Sistem Informasi Desa (SID) oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Tujuannya mempercepat penanggulangan kemiskinan (gulkin) di Kebumen, agar kinerja tim koordinasi gulkin bisa berjalan lebih optimal serta percepatan akses data dan informasi publik di desa.

Seiring berjalannya waktu serta menyesuaikan perubahan kebijakan dan nomenklatur di Kementerian Sosial Republik Indonesia, **"RUMAH HARAPAN"** kini berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesmas SLRT). Tupoksi yang semula hanya mendata warga yang tidak mampu, berapa jumlah warga miskin dan bantuan apa yang dibutuhkan (2015) berkembang menjadi 10 pelayanan yaitu : Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iur (KIS PBI) dan BAZNAS, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Orang Terlantar, Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum, Rekomendasi Adopsi Anak, Surat Tanda Daftar Ijin Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan, Rujukan Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi, Pelayanan Eks Psikotik Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ (2020).

Fungsi Puskesmas SLRT saat ini, selain menjadi wadah pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat, juga menerima ragam keluhan mulai dari pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, ekonomi. Melalui Puskesmas SLRT, masyarakat bisa mendapatkan penanganan serta rujukan program atau jenis bantuan sosial yang bisa memecahkan persoalannya.

Peranan Puskesmas SLRT semakin menonjol pada saat pandemi *Covid-19*, melalui pendataan, penyaluran, dan memperluas informasi yang lebih merata kepada masyarakat terkait bantuan sosial. Salah satunya mendorong peluncuran inovasi terbaru Dinas Sosial Kebumen yaitu aplikasi SOBATKU (2021). Masyarakat dapat mengetahui tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta jenis bantuan sosial apa saja yang diperoleh dengan cara mengakses <https://sobatkukebumen.online/> hanya dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nama seseorang.

Amanat pembentukan Puskesmas SLRT tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Di Kebumen, regulasi terbaru melalui Surat Keputusan Kadinsos P3A Nomor 460/340 tentang Pembentukan Sekretariat dan Penunjukan Sumber Daya Manusia Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu **"RUMAH HARAPAN"** di Kabupaten Kebumen.

Tercatat pada periode Januari sampai dengan September 2021, **"RUMAH HARAPAN"** telah memberikan layanan pada masyarakat kurang mampu sebanyak 4.538 orang, mayoritas mengurus/rujukan KIS PBI 4.203 orang (92,61%) dan mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 145 orang (3,2%), reaktivasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 357 orang, sisanya mengurus bantuan sosial, rekomendasi ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), listrik bersubsidi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Puskesmas SLRT **"RUMAH HARAPAN"** menjadi garda terdepan yang dapat diakses masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap layanan dan bantuan sosial. Keluhan masyarakat yang masuk melalui Puskesmas SLRT akan dirujuk ke berbagai pengelola program yang berwenang, sehingga dipastikan dapat tertangani dengan baik sekaligus terpantau proses penanganannya.

<https://s.id/LampiranIdelInovatif>

E1

Inovasi diuraikan dengan penjelasan lengkap serta inovasi memiliki sisi kebaruan dan nilai tambah.

E2

Uraian lengkap

Signifikansi (25%)

Uraikan secara singkat bagaimana inovasi ini diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan penilaian/ asesmen yang dilakukan untuk mengukur dampak/ keberhasilan inovasi.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 600 kata.

SLRT adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta membantu menghubungkan mereka dengan program perlinsos dan gulkin yang diselenggarakan pemerintah, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan ditangani dengan baik.

“RUMAH HARAPAN” hadir ditengah masyarakat memberi layanan 1) Informasi dan data program perlindungan sosial/perlinsos dan gulkin, 2) Penjangkauan oleh fasilitator untuk mengetahui kepesertaan dan kebutuhan program 3) Pusat penanganan keluhan dan rujukan, sehingga masyarakat mendapatkan multi layanan lintas sektor di Puskesmas SLRT sesuai kebutuhan.

Di Kebumen, masyarakat yang membutuhkan informasi tentang bantuan sosial/bansos di edukasi untuk cek mandiri melalui aplikasi SOBATKU dengan alamat <https://sobatkukebumen.online/> Menu yang bisa diakses adalah DTKS, Jenis Bansos, Pengaduan dan Laporan. SOBATKU melayani aduan masyarakat terkait bansos di Kabupaten Kebumen, baik pengaduan Bantuan Sosial Tunai (BST), Sembako, PKH, Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Masyarakat bisa mengakses kapan saja dan darimana saja, untuk melakukan pengaduan tanpa harus datang ke balai desa, kecamatan maupun Dinas Sosial. Apalagi dalam situasi pandemik saat itu, Kebumen mencanangkan “Gerakan Di Rumah Saja”, semua aktivitas dilakukan dari rumah dengan bantuan teknologi informasi.

Aduan tentang bansos masuk melalui pengaduan JPS Online sebanyak 142 aduan (Mei 2021), 99 aduan melalui Lapor Gubernur serta 85 aduan melalui SOBATKU (Juli 2021).

Gambaran Kondisi Sebelum – Sesudah Inovasi

No Kegiatan Utama	K o n d i s i Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
1. SDM pelaksana	Tidak ada penunjukan SDM pelaksana, sehingga belum diketahui secara jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab	Terdapat regulasi tentang SDM pelaksana Puskesmas SLRT (SK Kadinsos), lengkap dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga memudahkan dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan
2. Pembekalan Teknis	Tidak ada pembekalan teknis bagi SDM pelaksana	Dilakukan pembekalan teknis skala nasional maupun kabupaten bagi Manajer, <i>Front Office</i> , <i>Back Office</i> , Fasilitator dan Supervisor
3. Dukungan anggaran	Tidak ada dukungan anggaran untuk keberlanjutan inovasi	- Ada anggaran operasional dari Kemensos RI (2022) - Usulan anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi melalui DBHCHT dan rencana anggaran APBD Kabupaten 2023
4. Rakor dengan <i>stakeholder</i> tentang perlinsos dan gulkin	Tidak dilakukan rakor tentang perlinsos dan gulkin dengan <i>stakeholder</i>	Dilakukan rakor, advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan dukungan dan masukan dari <i>stakeholder</i>
5. Pembangunan aplikasi SOBATKU	- Tidak ada aplikasi bansos skala kabupaten - Tidak ada layanan aduan	- Ada aplikasi penerima bansos skala kabupaten sehingga memudahkan integrasi data bansos - Ada informasi bagi masyarakat tentang bansos - Ada wadah pengaduan bagi masyarakat tentang bansos
6. Sosialisasi tentang Puskesmas SLRT	Belum ada sosialisasi	Ada sosialisasi melalui media cetak dan elektronik (TV dan radio) sehingga masyarakat mengetahui tentang program perlinsos dan gulkin
7. Monitoring evaluasi (monev)	Belum ada monev	Survey Kepuasan Masyarakat terkait kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu, kompetensi petugas, perilaku petugas, kualitas sarpras, penanganan pengaduan - Pelayanan KIS (82,13); - Rekomendasi BAZNAS (86,90); - Pelayanan SKTM (84,49); - Rekomendasi layanan rujukan bagi ODGJ, disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis (86,17)
8. Akses masyarakat terhadap bantuan sosial dan jaminan sosial	Belum terintegrasi, masyarakat tidak tahu harus kemana mengurus bansos	Ada kerjasama multi pihak untuk memberi pelayanan lintas sektor pada masyarakat (Dinsos, Dinkes, BPJS, Baznas, Disdik, RS pemerintah, PLN), masyarakat diberi informasi oleh Puskesmas

9.	Lokasi kantong kemiskinan	Belum diketahui	Diketahui lokasi kemiskinan di 5 kecamatan (25 desa) sebagai prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu Kecamatan Alian, Karanggayam, Karangsambung, Sadang, Sempor serta diberi intervensinya (2021)
10.	Data tingkat kemiskinan	Data kemiskinan belum dimanfaatkan untuk program perlinsos dan gulkin	Data terolah dari BPS, ada trend penurunan tingkat kemiskinan, meski tahun terakhir naik karena pandemi : - Tahun 2015 : 20,44% - Tahun 2016 : 19,86% - Tahun 2017 : 19,6% - Tahun 2018 : 17,47% - Tahun 2019 : 16,82% - Tahun 2020 : 17,59% (pandemi) - Tahun 2021 : 17,83% (pandemi) Data dimanfaatkan untuk merumuskan intervensi dan kebijakan

Terlampir

Komentar/Saran evaluasi:

E1

Implementasi inovasi sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi.

E2

Uraian lengkap

Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)

Jelaskan kontribusi nyata yang dapat diukur dari inovasi terhadap capaian TPB pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 200 kata.

**Untuk informasi TPB lebih lanjut dapat mengakses laman:*

“RUMAH HARAPAN” hadir untuk memastikan seluruh warga yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial memiliki akses yang sama, tidak boleh ada seorang pun warga yang membutuhkan dan berhak mendapatkan layanan, tidak terlayani. Fasilitator Puskesmas SLRT aktif melakukan penjangkauan ke masyarakat terpinggirkan yang selama ini belum tersentuh layanan. Hal ini menunjukkan negara hadir memberikan layanan kepada masyarakat secara inklusif.

“RUMAH HARAPAN” mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pertama ‘Tanpa Kemiskinan’ dan tujuan sepuluh ‘Berkurangnya Kesenjangan’.

Capaian yang telah diraih :

Jangkauan pelayanan, telah menyeluruh pada 26 kecamatan, 460 desa, 1.406.606 jumlah penduduk, 847.065 warga DTKS, 128.180 KPM menerima sembako dan 62.375 KPM mendapat PKH.

Integrasi layanan, terpadu dan satu pintu dari berbagai institusi terkait, masyarakat tidak lagi dihadapkan dengan hambatan birokrasi untuk mengakses multi-layanan sosial.

Periode Januari-Februari 2022 layanan Puskesmas diberikan pada 1.951 orang, mayoritas mengurus KIS PBI 1.807 orang dan mengajukan SKTM 34 orang. Sejumlah 590 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Keluarga (PMKS) mendapatkan alat bantu (kruk ketiak, kaki palsu, alat bantu dengar, tongkat putih, kursi roda) sesuai kebutuhan setelah di *asesment* oleh Dinas Sosial. Sebanyak 3 buruh migran mendapat bantuan keuangan, 357 orang telah berhasil di aktifkan kembali kartu KIS PBI oleh BPJS atas usulan Puskesmas SLRT “RUMAH HARAPAN” (2021).

Terlampir

Komentar/Saran evaluasi:

E1

Inovasi Rumah Harapan berkontribusi nyata yang dapat diukur dari inovasi terhadap capaian TPB.

E2

Uraian baik

Adaptabilitas (20%)

Jelaskan bahwa inovasi telah diadaptasi/direplikasi/disesuaikan dan diterapkan oleh unit/instansi lain atau memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 400 kata.

Pada Desember 2019, Dinsos P3A Kabupaten Blora melakukan studi banding pengembangan SLRT di **"RUMAH HARAPAN" Kebumen**. Blora memiliki karakteristik sama dengan Kebumen, masuk dalam 15 kabupaten merah dengan tingkat kemiskinan 12,39% (rangking 22 se Jateng).

Pada Mei 2021, DPRD Kabupaten Magelang kunjungan kerja tentang program perlindungan sosial dan mengenal aplikasi SOBATKU. Magelang merupakan kabupaten merah rangking 21 dengan tingkat kemiskinan 11,91%.

Kemensos RI mendorong "Gerakan Satu Desa Satu Puskesmas", sebagai layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) tingkat desa, yang merupakan 'miniatur' SLRT kabupaten. Keberadaan Puskesmas desa untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlinsos dan gulkin baik yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa atau swasta.

Pada tahun 2021, telah di replikasi dua Puskesmas tingkat desa dengan regulasi :

1. SK Kades Peniron Nomor 460/01/KEP/2022 tentang Pembentukan Sekretariat dan Penunjukan SDM Pelaksana Puskesmas **"RUMAH SEJAHTERA"**, Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan
2. SK Kades Krakal Nomor 460/2/KEP/2022 tentang Pembentukan Sekretariat dan Penunjukan SDM Pelaksana Puskesmas **"MARGO RAHAYU"** Desa Krakal Kecamatan Alian

Alasan pengembangan berdasarkan KEPMENSOS Nomor 133/HUK/2019 tahun 2019, Jumlah penduduk miskin Desa Peniron sebanyak 997 rumah tangga (rangking 3 termiskin) dan Desa Krakal sebanyak 952 rumah tangga (rangking 8 termiskin) se Kabupaten Kebumen.

Tema Puskesmas desa telah diangkat menjadi proyek perubahan dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Badan Diklat Yogyakarta (2022) dengan judul "Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui *mobile service* bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen", dengan target jangka menengah seluruh desa di Kecamatan Pejagoan akan dibentuk Puskesmas.

Puskesmas desa didirikan dengan tujuan melayani kelompok sasaran : warga miskin dan rentan miskin yang masuk atau tidak masuk DTKS dan tinggal di desa setempat, PMKS, serta warga yang memerlukan pelayanan perlinsos dan gulkin. Puskesmas desa mendekatkan layanan SLRT dengan masyarakat pedesaan sehingga tidak harus menempuh jarak yang jauh ke kabupaten. Layanan Puskesmas dilakukan oleh warga dan untuk warga sebagai perwujudan negara hadir di tingkat desa.

Sekretariat Puskesmas Desa dikelola penanggungjawab (Kades); koordinator (Sekretaris Desa/Kasie Kesra); *Front Office dan Back Office*. Tugasnya :

1. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin
2. Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan tersebut sesuai kapasitas desa

3. Memberikan rujukan atas keluhan tersebut kepada pengelola program/layanan sosial di desa atau kabupaten melalui SLRT;
4. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di desa (bila memungkinkan)
5. Mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi DTKS
6. Menyusun laporan kegiatan Puskesmas untuk disampaikan pada sekretariat SLRT kabupaten

Terlampir

Komentar/Saran evaluasi:

E1

Inovasi memiliki potensi untuk direplikasi dan telah dilakukan replikasi oleh instansi internal.

E2

Telah ada studi banding

Keberlanjutan (20%)

Jelaskan sumber daya yang digunakan (berupa sumber daya keuangan, manusia, metode, peralatan atau material), strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut (berupa strategi institusional, strategi sosial, dan strategi manajerial), serta faktor kekuatan (internal) dan peluang (eksternal) dalam mendukung keberhasilan inovasi.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 600 kata.

Sumber Daya Manusia (SDM), unsur pelaksana utama pelayanan Puskesmas SLRT "RUMAH HARAPAN" dan tugasnya :

1. Manager (1 orang), mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi sekretariat SLRT di daerah,
2. *Front Office* (2 orang), menerima dan mendaftarkan keluhan warga terkait layanan sosial di daerah, memberikan informasi tentang layanan yang tersedia di sekretariat SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan,
3. *Back Office* (2 orang), menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh *Front Office*, memberikan jawaban atau kepastian atas aduan yang diterima,

4. Fasilitator (20 orang), melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat. Fasilitator dari unsur Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian (Pordam), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan relawan sosial lainnya.

Semua petugas Puskesmas SLRT telah mengikuti bimbingan teknis baik di level nasional maupun di kabupaten.

Sarana dan prasarana yang tersedia : papan nama; ruang sekretariat; papan informasi; ruang tunggu; ruang penerima pengaduan; ruang pemberi layanan dan rujukan; ruang Manajer; ruang rapat/konsultasi, banner dan petunjuk cara mengoperasikan aplikasi SOBATKU. Alat elektronik berupa : telpon genggam, komputer dan printer.

Anggaran tahun 2022 untuk biaya operasional Puskesmas SLRT berasal dari Kemensos RI 30 juta (APBN) sedangkan dari kabupaten melekat pada program perlindungan dan jaminan sosial (APBD). Rencana diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2022, kegiatan pembentukan Puskesmas tingkat desa menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (SILPA DBHCHT) tahun 2021. Di tahun 2023, anggaran melekat pada kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Dinsos rencana dialokasikan 150 juta.

Untuk menginformasikan keberadaan Puskesmas SLRT pada masyarakat dilakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik seperti rapat koordinasi, koran lokal, radio In FM dan televisi lokal Kebumen.

Strategi perluasan dan keberlanjutan SLRT :

1. Advokasi dan sosialisasi pada *stakeholder* di berbagai tingkatan tentang pentingnya penguatan koordinasi dan integrasi program perlinsos dan gulkin;
2. Menyusun rencana aksi yang menjadi pedoman dalam pengembangan Puskesmas SLRT;
3. Memastikan hasil kerja Puskesmas SLRT dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh pengelola program di pusat dan di daerah;
4. Membangun *pentahelix* partisipasi sektor non pemerintah (media, Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat sipil, pihak swasta dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kerja Puskesmas SLRT);

Pendekatan Manajemen Risiko :

No.	Kendala	Risiko	Strategi
1.	Dukungan anggaran APBD dan SDM relatif terbatas	Menghambat implementasi program kerja	- Mengoptimalkan anggaran tersedia - Menggandeng mitra non pemerintah - Mengoptimalkan jejaring - Mengotimalkan SDM dan peralatan yang ada
2.	Pemahaman dan motivasi <i>stakeholder</i> kurang karena belum memahami manfaat inovasi	Pelaksanaan inovasi kurang optimal	- Menjalin komunikasi intensif formal/ informal dengan <i>stakeholders</i> - Memberi pemahaman arti pentingnya inovasi

3. Data penerima bansos dari Kementerian Sosial selalu berubah/ <i>update</i>	1. Data tidak valid, tidak tepat sasaran 2. Kemungkinan ada duplikasi penerima bansos dan belum tersasar bansos 3. Banyak aduan dari masyarakat	1. Verifikasi dan validasi data di lapangan 2. Pemutakhiran data 3. Monev
4. Aplikasi SOBATKU https://sobatkukebumen.online/ sedang dalam tahap <i>updating</i> dan pengembangan	Masyarakat tidak dapat mengakses SOBATKU	<i>Front office</i> Rumah Harapan menggunakan aplikasi dari provinsi dan Kemensos untuk mengedukasi masyarakat - www.siks.kemsos.go.id - www.caribdt.dinsos.jatengprov.go.id

Kekuatan internal :

1) Jumlah SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cukup memadai tersebar di 26 kecamatan dan 460 desa

2) Survey Kepuasan Masyarakat terkait kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu, kompetensi, perilaku petugas dalam pelayanan, kualitas sarana prasarana serta penanganan pengaduan menunjukkan hasil yang baik : Pelayanan KIS (82,13); Rekomendasi BAZNAS (86,90) Pelayanan SKTM (84,49), Rekomendasi layanan rujukan bagi ODGJ, disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis (86,17).

Peluang eksternal :

Inovasi selaras Misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Kebumen periode 2021-2026 “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *opengov* yang terintegrasi”

Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Nomor 4 tahun 2021, Nomor 001/STIEPB/MOU/III/2021 tentang Kerjasama Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Kebumen melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (ruang lingkup gulkin)

Terlampir

Komentar/Saran evaluasi:

Strategi keberlanjutan yang dilakukan dengan dukungan sumber daya dan faktor kekuatan dan peluang yang ada sangat jelas.

E2

Uraian sangat lengkap

Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)

Jelaskan pemangku kepentingan yang terlibat dan kontribusinya dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi ini.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 200 kata.

“RUMAH HARAPAN” merupakan layanan satu pintu untuk membantu menghubungkan dan memudahkan maskin dalam mengakses berbagai layanan perlintsos dan gulkin yang dikelola pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Peran *stakeholder* :

No Stakeholder

Kontribusi/Dukungan/Fasilitasi

1. Bupati	Pengambil kebijakan, Rekomendasi permohonan warga membutuhkan pelayanan kesehatan mendesak
2. Wakil Bupati	Ketua Tim Koordinasi Gulkin Daerah, Dukungan kebijakan
3. Sekda	Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
4. Dinsos Provinsi Jateng	Bimtek SDM Puskesmas
5. Kemensos RI	Fasilitasi Anggaran, Bimtek SDM Puskesmas
6. Komisi B DPRD Kebumen	Evaluasi program bansos
7. Bappeda	Anggota TAPD
8. Dinkes	Maskin belum terakses BPJS
9. Disdukcapil	Maskin belum memiliki administrasi kependudukan (adminduk)
10. Disdik	Pengajuan KIP
11. Diskominfo	Dukungan aplikasi SOBATKU
12. Inspektur	Monev bansos
13. Rumah Sakit/Puskesmas	Maskin belum terakses BPJS
14. PLN	Maskin belum terakses Listrik bersubsidi
15. BPJS	Penerbitan dan reaktivasi KIS PBI
16. BAZNAS	Bansos maskin
17. Camat dan Kades	Penerbitan SKTM
18. Operator Kec dan Desa	Maskin belum memiliki adminduk, Usulan DTKS
19. Himbara/PT Pos/e warong/Korda Sembako	Program sembako
20. Korkab PKH	PKH
21. TKSK	Program sembako, evakuasi ODGJ
22. Masyarakat	Laporan/aduan perlinsos dan gulkin

Untuk mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat disusun SK Kadinsos Nomor 467/1339/SK/II/2020 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Terlampir

Komentar/Saran evaluasi:

E1

Pemangku kepentingan yang terlibat sangat banyak dan memiliki tupoksi jelas dalam implmentasi inovasi.

E2

Uraian sangat lengkap

